



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**STUDI AWAL RELOKASI
IKK SIDAREJA KABUPATEN DATI II CILACAP
MELALUI KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Oleh :
Budi Sudarwanto, dkk

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Dibiayai oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro,
sesuai Perjanjian Pelaksanaan Penelitian tanggal 25 Agustus 1998
Nomor : 3908/PT09.H2/N/1998.

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian :
"Studi Awal Relokasi Ibukota Kecamatan Sidareja Kabupaten Dati II
Cilacap melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat"
- b. Macam Penelitian : Terapan
- c. Kategori : III
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama : Ir. Budi Sudarwanto, MT
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda Tk. I / IIIA / 131931639
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - e. Fakultas/Jurusan : Teknik/Arsitektur
 - f. Universitas : Diponegoro
 - g. Bidang Ilmu : Manajemen Pembangunan Kota
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 orang
4. Lokasi Penelitian : IKK Sidareja Kab. Dati II Cilacap
5. Kerjasama : Bappeda Kabupaten Dati II Cilacap
Jl. Kauman 28 B Cilacap
6. Jangka Waktu : 4 bulan
7. Biaya Yang diperlukan : Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah)

Semarang, 25 Februari 1999

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro


Bambang Setioko, MEng
NIP. 130.516.595

Ketua Peneliti,


Ir. Budi Sudarwanto, MT
NIP. 131.931.639

Menyetujui :

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Satoto
NIP. 30.368.071

RINGKASAN

Masalah bencana banjir adalah bencana laten bagi masyarakat kota Sidareja. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah memindahkan sebagian kawasan kota yang terkena banjir ke kawasan banjir. Lokasi pemindahan tersebut adalah desa Kunci. Upaya kegiatan pemindahan ini melibatkan aspirasi masyarakat kota, khususnya yang terkena banjir tiap tahunnya.

Ada 5 aspek yang menjadi dasar kegiatan pembangunan akan berjalan sesuai dengan sasaran pembangunan kota. Pertama, adalah rencana pemanfaatan ruang kota, Masalah pembiayaan, Masalah perubahan guna lahan, Masalah peraturan/kebijakan, dan Masalah Pengelolaan.

Tujuan penelitian ini adalah membahas pengaruh ke 5 aspek tersebut terhadap aspirasi masyarakat kota Sidareja. Dalam tahap awal penelitian ini adalah aspek rencana pemanfaatan ruang kota, khususnya di lokasi baru (desa Kunci).

Hasil penelitian menunjukkan adanya tanggapan positif masyarakat kota terhadap rencana Pemerintah memindahkan beberapa fasilitas kegiatan kota. Positif menunjukkan kesediaannya secara swakarsa untuk menyelenggarakan proses pembangunan secara mandiri. Bahkan dunia swasta (kontraktor) ikut berperan dalam proses relokasi tersebut. Pemerintah Daerah sebagai fasilitator proses pembangunan menyediakan beberapa kemudahan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat kota Sidareja, terutama dalam rangka menunjang kegiatan tersebut.

KATA PENGANTAR

Peningkatan kemampuan meneliti bagi tenaga pengajar (dosen) senantiasa harus dilakukan secara terus menerus untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu upaya wujud nyata adalah terlaksananya kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Dana Rutin Lembaga Penelitian UNDIP.

Laporan hasil penelitian yang berjudul "Studi Awal Relokasi IKK Sidareja Kabupaten Dati II Cilacap melalui Konsep Pemberdayaan" adalah satu bagian kegiatan penelitian yang telah dilakukan selama 4 bulan. Kajian awal substansi hasil penelitian masih bersifat makro dan belum menyentuh substansi dasar yang menjadi sasaran kajian. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kerjasama dengan Bappeda Dati II Kabupaten Cilacap, sehingga proses kegiatan penelitian pun menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

Jauh dari harapan semoga hasil penelitian ini dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang berminat. Segala saran dan kritik untuk kesempurnaan hasil penelitian akan kami terima.

Semarang, Februari 1999

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR/ILUSTRASI	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Hambatan Pelaksanaan Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Pembangunan Wilayah	4
2.2. Pemberdayaan Masyarakat	5
2.3. Masyarakat dan Perubahan Sosial	6
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
3.1. Tujuan Penelitian	8
3.2. Manfaat Penelitian	8
IV. METODA PENELITIAN	10
4.1. Kerangka kerja Penelitian	10
4.2. Metoda Penelitian	11
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	14
5.1. Masalah Bencana Banjir	14
5.2. Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Sidareja	15
5.3. Program Pengembangan Wilayah Kota Sidareja	17
5.4. Tahapan Pelaksanaan Pengembangan Kota Sidareja	23
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	30

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

P.1.	Indikasi Daerah Rawan Bencana Banjir	25
P.2.	Analisis Persoalan Jangka Pendek	26
P.3.	Analisis Keadaan Fisik Dasar	27
P.4.	Analisis Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota	28
P.5.	Analisis Kecenderungan Pertumbuhan Kota	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ibu Kota Kecamatan Sidareja adalah Kota Sidareja, secara geografis terletak sebelah barat laut dari kota Cilacap yang berjarak lebih kurang 74 km. Wilayah administratif terdiri dari 4 desa/kelurahan yaitu : Tinggarjaya, Sidareja, Sidamulya, dan Kunci, dengan luas wilayah 1.347 ha. Jumlah penduduk pada tahun 1990 berjumlah 102.950 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,94 %. Perekonomian kota digerakan oleh kegiatan industri sedang dan industri kecil, serta kerajinan/industri rumah tangga dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 4,38 % (1980).

Pola kecenderungan perkembangan kota berbentuk linear. Jalan utama kota yang membelah kota merupakan 'pita magnet' yang menarik hampir semua sisi kegiatan kota seperti kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan industri, kegiatan perhubungan (transportasi), kegiatan pendidikan, kegiatan pemerintahan, dan pelayanan umum lainnya serta kegiatan pemasaran pertanian.

Kendala fisik kota yang selama ini memperlambat kegiatan pembangunan adalah adanya beberapa anak sungai yang melintas kota dan mengakibatkan banjir bila musim hujan tiba. Ketinggian banjir di sepanjang jalan kota bisa mencapai 1 meter lebih. Hambatan ini menjadi persoalan utama bagi pemerintah daerah setempat karena investasi prasarana yang dibangun akan rusak bila musim hujan tiba. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong untuk memindahkan ibu kota kecamatan Sidareja atau kota Sidareja ke kawasan yang bebas banjir. Pengamatan fisik telah dilakukan pemerintah daerah dan ditentukan di desa Kunci sebagai alternatif lokasi yang baru.

Upaya pemindahan ini tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat kota Sidareja sebagai penduduk setempat. Masyarakat kota Sidareja adalah

merupakan salah satu target utama dari visi pemindahan lokasi kota Sidareja. Tanpa adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat kota maka dimungkinkan pemindahan lokasi tersebut tidak akan pernah terjadi atau program pemindahan tersebut tidak mencapai target yang dituju.

Salah satu paradigma pembangunan yang diamanatkan dalam GBHN adalah memberikan peluang partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam kegiatan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu paradigma proses pembangunan berorientasi dari bawah keatas. Pemindahan lokasi kota Sidareja akan '**sangat berhasil**' bila melibatkan masyarakat kota sebagai subyek didalam proses relokasi tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah pertama adalah awal cara pandang yang keliru dari pihak pemerintah daerah, bahwa relokasi merupakan ide dari pihak pemerintah daerah (cq. Bupati) bukan kehendak masyarakat kota. Tentunya keterkaitan terhadap mekanisme pembangunan menjadi lain bila melalui konsep pemberdayaan masyarakat. Mempermasalahkan cara pandang top-down terhadap bottom-up sesuatu yang 'kontra-produktif', karena visi bersumber pada lain kutub dan tidak akan menyelesaikan masalah. Sehingga cara pandang penyelesaian masalah adalah masyarakat itu sendiri, apakah memang benar-benar menginginkan kepindahan ibu kota lama (desa Sidareja) ke lokasi baru (desa Kunci) ?.

Berlatar budaya timur akan sangat erat dengan budaya leluhurnya sehingga motivasi untuk pindah ibu kota harus sejalan dengan karakter budaya setempat. Kemampuan ekonomi yang memadai di lokasi lama belum tentu sebaik bila pindah ke lokasi baru, hari depan masih belum terbayang, belum mampu menentukan pilihan-pilihan ekonomi bila pindah. Sumberdaya lahan di lokasi lama belum tentu berlimpah di lokasi baru dan sebaliknya. Jadi pengambilan keputusan masyarakat untuk pindah adalah hal yang sangat tidak jelas.

Keputusan yang harus diambil harus benar-benar bermanfaat dan memberikan harapan dimasa datang.

Variabel-variabel pengaruh keinginan untuk pindah lokasi ibu kota sangat penting untuk digali dari aspirasi masyarakat kota. Manfaat besar akan diperoleh bila motivasi adalah besar atau ada minat untuk pindah. Selain itu akan sangat membantu pelaksanaan pembangunan yang telah diawali oleh pihak pemerintah. Transparansi pihak pemerintah harus terbuka tanpa adanya pamrih sesuatu.

1.3. Hambatan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian mengalami beberapa kendala diluar jangkauan kemampuan peneliti. Kendala tersebut adalah :

- Program pemindahan beberapa fasilitas kota merupakan inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Cilacap, bukan dari Masyarakat setempat. Oleh karena itu ada upaya intervensi kebijakan dari Pemerintah, yaitu khususnya kebijakan penyiapan lahan seluas 100 ha. Pembiayaan pembebasan lahan diperoleh melalui bantuan dari Departemen Transmigrasi yang sampai saat ini belum mencapai kesepakatan final.
- Terkait dengan masalah diatas maka kajian penekanan aspirasi diperoleh melalui observasi tak langsung melalui pembahasan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sidareja. Dengan penekanan bahasan pada pemecahan masalah bencana banjir yang melanda beberapa warga kota Sidareja, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menyebabkan timbulnya bias-bias penelitian yang tentunya tujuan awal penelitian tidak dapat dipenuhi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Wilayah

Azas tujuan pembangunan wilayah ada tiga yaitu pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan berkelanjutan (*sustainability*). Bias yang terjadi selama ini dalam pembangunan wilayah termasuk didalamnya adalah perencanaan kota adalah bahwa perencanaan dilakukan oleh pusat tidak dilakukan oleh daerah. Bias yang terjadi karena ada perbedaan kepentingan dan tujuan yang diinginkan masyarakat wilayah dengan apa yang dipikirkan oleh pusat. Aspirasi lokal tidak secara maksimal teradopsi dalam kegiatan pembangunan wilayah. Akibatnya azas tujuan tidak terwujud, masih banyak wilayah tertinggal, kemiskinan struktural meningkat, angka pengangguran besar, dan keadaan ekonomi menjadi terpuruk.

Perencanaan kota adalah satu bentuk pembangunan wilayah yang memiliki dimensi ruang (tata ruang). Ada tiga kegiatan utama didalamnya, yaitu 1) proses penyusunan dan 2) prosedur penyusunan rencana tata ruang, serta 3) penetapan rencana tata ruang yang keseluruhan kegiatan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang RI No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi dalam Penataan Ruang; sedangkan suatu Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Dalam UUPR sangat ditekankan pentingnya individu dalam penataan ruang dengan mengedepankan aspek hak dan kewajiban individu. Selain itu ada butir yang harus diperhatikan dalam UUPR, bahwa hak perorangan harus dihormati. Pemerintah juga harus secara terus menerus meningkatkan apresiasi masyarakat mengenai penataan ruang melalui penyebaran luasan rencana tata ruang serta mengembangkan

kesadaran dan tanggung jawab melalui berbagai cara. Salah satu cara tersebut adalah dengan memberdayakan masyarakat melalui pendekatan kelompok yang disebut '*community based development*'.

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat "people centered, participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995)

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai objek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya itu sendiri. Hal ini harus mengikuti beberapa hal :

- a. upaya tersebut harus terarah (targeted pemihakan)
- b. program harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran
- c. menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Secara mekanistik bahwa pemberdayaan harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat, aspek yang teramat penting adalah :

1. peranan pemerintah
2. organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri
3. lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri
4. koperasi
5. pendamping
6. pemberdayaan masyarakat harus dicerminkan dalam proses perencanaan pembangunan nasional dari bawah ke atas.

Kerangka berfikir dasar dapat dilihat dari tiga sisi :

1. pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling)
2. kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki
3. ketiga, adalah memberdayakan mengandung arti pula melindungi (kepemihakan kepada yang lemah).

Strategi cara pandangnya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagaimana yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya.

2. 3. Masyarakat dan Perubahan Sosial

Masyarakat sebagai himpunan individu yang berinteraksi sesamanya selalu bersifat dinamis. Karena itu tidak ada satu masyarakat pun yang akan meniru secara utuh apa yang diwariskan oleh leluhurnya. Ponsion (1969) mengatakan, "Perubahan sosial akan selalu terjadi yang menggambarkan dinamika masyarakat secara keseluruhan". Hubungan kebudayaan dengan individu menurut Krech et. al. (1962; 1976), "Berlangsung dua arah. Kebudayaan mempengaruhi orang yang menghasilkan stabilitas dan kesinambungan budaya, individu juga mempengaruhi kebudayaan yang menghasilkan perubahan sosial". Kemudian Horton (1976) menyatakan,

"Semua kebudayaan secara tetap berubah, sebagian cepat dan sebagian lagi lambat. Usaha melestarikan budaya tanpa perubahan tidak akan berhasil. Perubahan sosial berlanjut dan tak tertahankan, hanya kecepatan dan arahnya yang berbeda. Proses perubahan sosial adalah, penemuan (discovery), invensi, dan difusi".

Sedangkan penyebab perubahan menurut Sutherland adalah, "inovasi, invensi, adaptasi, dan adopsi, yang dapat dikelompokkan menjadi difusi kebudayaan dan inovasi penemuan" (Susanto, 1985). Mengenai difusi kebudayaan Ogburn menyatakan (Martindale, 1982) :

"Kebudayaan adalah produksi akumulatif dari masyarakat manusiawi, yang terdiri dari objek material, pranata sosial, dan tata cara sosial. Perubahan budaya adalah perubahan pada

produksi tersebut. Faktor dasar dari perubahan budaya adalah akumulasi bentuk budaya yang merupakan hasil dari penemuan dan invensi. Elemen-elemen dasar dari proses sosial adalah invensi, difusi, dan adaptasi elemen-elemen budaya".

Selanjutnya mengenai perubahan sosial, Ogburn menjelaskan thesisnya, "Beberapa bagian budaya modern tidak berubah pada tingkat yang sama, beberapa bagian berubah lebih cepat dari yang lain, dan karena ada korelasi dan keterkaitan antar bagian maka perubahan yang cepat pada satu bagian membutuhkan penyesuaian kembali di bagian lain". Proses tersebut digambarkan oleh Ogburn (Sukanto, 1986) bahwa :

"Perubahan merupakan proses invensi, akumulasi, difusi, dan penyesuaian. Penemuan baik mekanis maupun sosial berasal dari tiga faktor, yaitu aktifitas mental, permintaan (demand) dan keberadaan elemen budaya lain. Akumulasi terjadi ketika lebih banyak elemen ditambahkan pada basis budaya. Difusi menunjukkan penyebaran invensi. Penyesuaian terjadi ketika sebuah penemuan berinteraksi dengan elemen budaya lain".

Dalam analisisnya Ogburn (Sukanto, 1986) membuktikan, "Inovasi teknologis penting sebagai faktor penyebab terjadinya perubahan, sedangkan bidang sosial dan kebudayaan cenderung tertinggal oleh inovasi tersebut. Kondisi di atas disebut sebagai ketimpangan budaya, yaitu terjadinya ketimpangan antara budaya material dan non material".

Setiap masyarakat memiliki norma-norma dan nilai-nilai sendiri yang dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Mengenai norma dan perubahan sosial, Karl Mannheim (Susanto, 1986) menyatakan :

"Karena perubahan norma dan proses pembentukan norma baru merupakan inti dari usaha mempertahankan persatuan hidup berkelompok, dengan sendirinya proses perubahan sosial menjadi proses disintegrasi dalam banyak bidang, sehingga demi kemajuan harus diusahakan adanya reintegrasi dimana norma-norma yang lebih cocok akan merupakan ikatan dari masyarakat yang baru. Jelaslah proses perubahan sosial pada intinya adalah perubahan norma masyarakat".

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Memahami aspirasi masyarakat sebagai bagian dari subjek pembangunan yang selama ini tidak pernah diikuti dalam proses pembangunan. Memahami akan dinamika kelompok masyarakat akan mengerti faktor-faktor yang menjadi cita-cita masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang diinginkan. Dalam hal ini sebagai kasus adalah relokasi ibukota kecamatan, apakah mereka sepakat untuk pindah atau ada pertimbangan lain ?.

Bila faktor pengaruh diperoleh maka dapat dipilah-pilah mana yang dominan dan mana yang minoritas. Apakah itu aspek pemanfaatan ruang, aspek ekonomi, aspek sosial, atau bahkan aspek budaya yang dimiliki masyarakat setempat. Sehingga mengetahui hal-hal yang menyebabkan faktor tersebut kuat berpengaruh atau sebaliknya. Pemilihan ini akan bermanfaat bagi pihak pengambil keputusan (*pemerintah daerah*) untuk melandasi kegiatan pembangunan selanjutnya.

3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh adalah :

Manfaat *obyektif* adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan perencanaan dan perancangan kota khususnya permasalahan pengembangan kota melalui paradigma 'bottom-up planning' (partisipasi masyarakat).

Manfaat *subyektif* adalah untuk penentu kebijakan (pemda) memperoleh 'alternatif pengambilan keputusan' didalam mengembangkan kebijakan pembangunan kota dan daerahnya melalui konsep pemberdayaan masyarakat.

Disisi lain bagi seorang 'planner' merupakan ajang eksplorasi ilmu pengetahuan, khususnya perencanaan dan perancangan kota yang ber-'aspirasi' dari bawah (bottom-up planning).

BAB IV

METODA PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan merupakan '*eksplorasi-methods*'. Eksplorasi aspirasi masyarakat tentang relokasi ibukotanya, khususnya masyarakat yang berdomisili di kota Sidareja. Lingkup eksplorasi itu sendiri mengenai rencana tata ruang, pendanaan, lahan, ke-pranata-an, dan pengelolaannya. Melalui proses, prosedur, dan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap rencana relokasi itu sendiri ?.

Secara rinci langkah-langkah kerangka kerja dan metoda penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.1. Kerangka kerja penelitian

Pemahaman aspirasi masyarakat akan program relokasi dapat dilihat sebagai suatu sistem proses. Kemampuan ekonomi, pola sosial dan budaya masyarakat, penguasaan sumber daya alam, dan masalah sumber daya manusia merupakan variabel-variabel input yang berproses dan menghasilkan kekuatan hasil minat pindah dalam proses relokasi IKK Sidareja. Proses pemanfaatan ruang kota yang meliputi rencana tata ruang, pendanaan, lahan, ke-pranata-an, dan pengelolaannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dipengaruhi oleh variabel-variabel input tersebut diatas, sehingga tingkat keberhasilannya akan dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat.

Secara sistematis proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

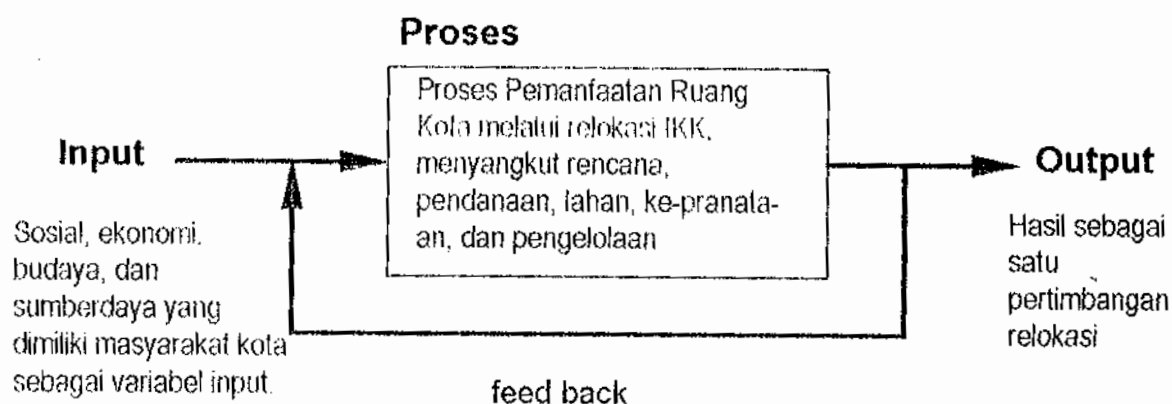


Diagram 1 : Model Proses Relokasi Kota Sidareja

4. 2. Metoda penelitian

a) Desain penelitian

Rancangan penelitian adalah merupakan strategi untuk pembuktian atau pengujian atas variabel-variabel dalam lingkup penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Strategi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasi.

Pendekatan *deskriptif* dilakukan untuk mengetahui aspirasi masyarakat terhadap relokasi IKK yang merupakan inisiatif pihak pemerintah. Aspirasi masyarakat Sidareja dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan aspek budayanya yang merupakan variabel-variabel input sebagai pijakan motivasi masyarakat itu sendiri.

Sedangkan *korelasi* untuk melihat keterkaitan aspirasi masyarakat terhadap proses pemanfaatan ruang kota, yang didalamnya adalah rencana tata ruang, pendanaan, lahan, ke-pranala-an, dan pengelolaannya. Sejauhmana aspirasi yang dimiliki masyarakat mampu mendorong kegiatan proses pemanfaatan ruang melalui Relokasi IKK ?.

Secara skematik rancangan penelitian adalah sebagai berikut :

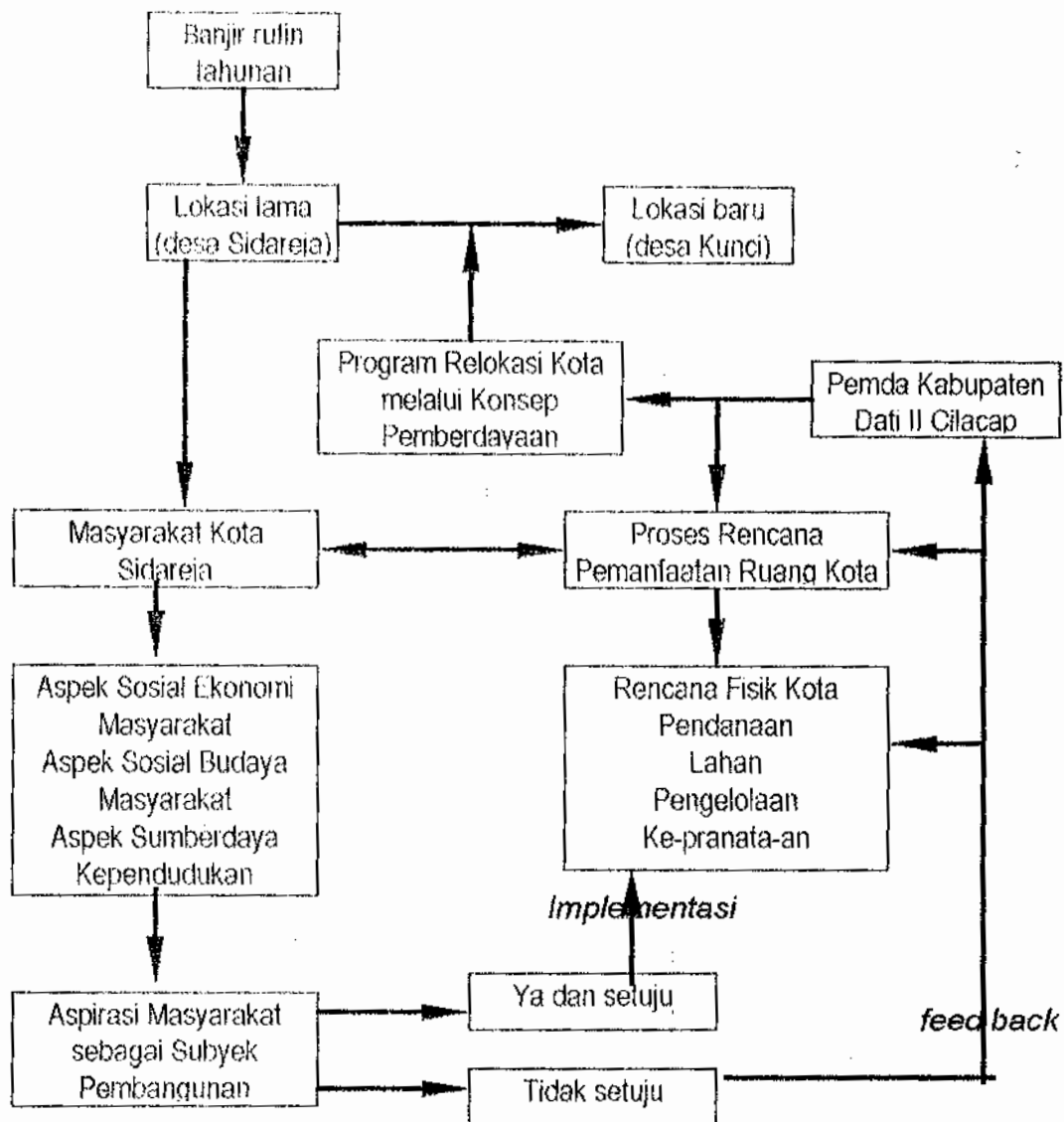


Diagram 2 : Model Konseptual Alur Pikir Penelitian

b) Penentuan sampel

Penentuan sampel didasarkan atas gabungan metoda pooling dan metoda random, yaitu masyarakat yang tinggal di desa Sidareja (kota lama) dibagi kedalam pool-pool sebagai perwakilan wilayah dan kemudian setiap pool tersebut

diambil sampel secara random. Penentuan pool didasarkan atas luasnya wilayah kota Sidareja 1,347 ha dan jumlah penduduknya 102.950 jiwa (1990).

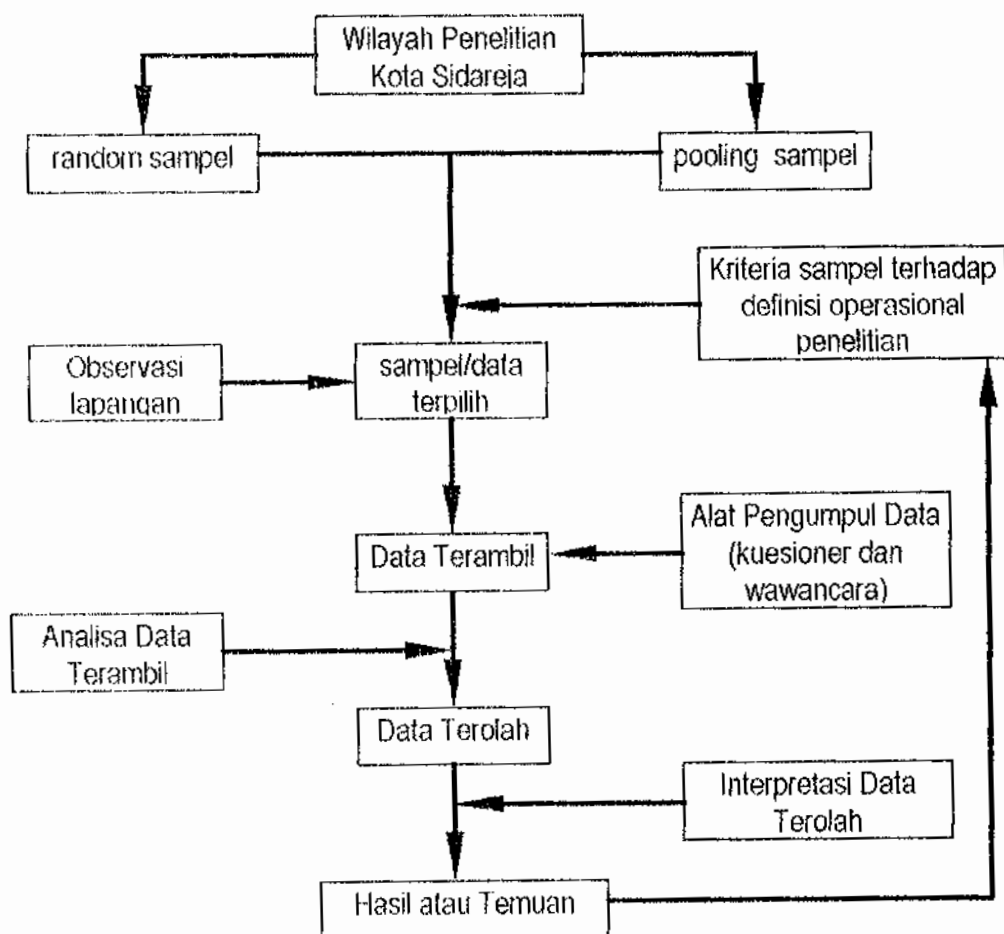
c) Lokasi dan tempat penelitian

Lokasi dan tempat penelitian adalah Ibukota Kecamatan Sidareja atau Kota Sidareja, Kabupaten Cilacap.

d) Alat dan metoda pengumpul data

Alat pengumpul data didasarkan atas kerangka kerja penelitian yang telah dijelaskan pada point 1 (kerangka kerja penelitian), sedangkan metoda pengumpul data melalui teknik observasi dan wawancara dengan melakukan survey primer (survey lapangan) melalui penyebaran kuesioner penelitian sebagai instrumentasi.

Secara diagramatik kegiatan pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut :



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Masalah Bencana Banjir

Kota Sidareja terletak pada ketinggian rata-rata 16 meter di atas permukaan laut. Bentuk medan permukaan tanah Kota Sidareja sebagian besar (90%) berupa tanah yang relatif datar dengan kemiringan antara 0-2 %, sedangkan lainnya bergelombang (kemiringan 2 - 15 %) sampai berbukit dengan tingkat kemiringan 15-45 %. Daerah bergelombang dan berbukit dimiliki desa Kunci yang terletak pada ketinggian 26-60 meter di atas permukaan air laut.

Kota Sidareja dikelilingi batas alam berupa sungai, di sebelah Barat oleh Sungai Ciwera, di bagian tengah dilalui Sungai Cidurian, Sungai Citengah dan Cikalong, di sebelah Timur oleh Sungai Cibogo dan Ciloning, di sebelah Selatan oleh Sungai Cibeureum. Kota Sidareja ini juga dilalui oleh saluran primer yang melintas di Desa Kunci.

Penyediaan air bersih di Kota Sidareja diambil dari sumber alam berupa sumur-sumur gali dan dari sungai. Sedangkan untuk pengairan area pertanian, air yang digunakan diperoleh dari saluran primer yang melewati desa Kunci.

Secara umum Kota Sidareja yang dikelilingi sungai-sungai tersebut merupakan wilayah yang rawan terhadap genangan air. Adapun luasan secara rinci daerah rawan banjir di wilayah kecamatan Sidareja adalah 472 ha (*sumber : buku 'Pelaksanaan Program Pemindahan Penduduk Kota Sidareja' disusun oleh pemda Kab. Dati II Cilacap - 1998*).

Hal ini dapat dilihat dengan sering terjadinya bencana banjir (bencana banjir selalu terulang setiap tahunnya) yang mengakibatkan rusaknya berbagai sarana dan prasarana kota serta terganggunya aktivitas penunjang kehidupan kota Sidareja, yang merupakan wilayah relatif ramai dalam kegiatan perekonomiannya disamping kegiatan pemerintahan. Dengan kondisi topografi kota Sidareja yang memiliki elevasi rendah (5-10 m di atas permukaan air laut),

maka jika terjadi banjir genangan yang terjadi berkisar antara 20 - 70 cm dari permukaan tanah. Adapun genangan tertinggi sedalam 70 cm terjadi di lokasi desa Sidareja dan Sudagaran. Genangan tersebut terjadi akibat dari meluapnya air sungai Citanduy dan Cibeureum yang beranak sungai Cidurian, Cibogo, Cikalong dan Citayem yang tidak mampu lagi menampung arus air sungai pada kondisi yang demikian itu.

Melihat kondisi kritis tersebut, maka penduduk yang lingkungan pemukimannya termasuk dalam wilayah rawan banjir perlu segera untuk dipindahkan ke wilayah yang lebih aman terhadap bencana tersebut.

Dari seluruh wilayah Kota Sidareja, hanya desa Kunci saja yang terbebas / relatif aman dari bencana banjir tahunan. Hal itu disebabkan oleh situasi dan kondisi topografis desa Kunci yang berbukit (dengan kemiringan 15-45 %) dan terletak pada ketinggian 26-60 meter di atas permukaan air laut.

5.2. Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Sidareja

Permasalahan perencanaan yang dapat ditemui di wilayah perencanaan terutama bertolak dari keadaan yang dapat di temui di lapangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan menuju ke bentuk kota yang diinginkan dalam RUTRK maupun RDTRK. Permasalahan tersebut pada hakekatnya menggambarkan 'jarak' antara keadaan sekarang dengan keadaan yang ingin dicapai di masa depan serta tingkat usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai keadaan yang hendak dituju tersebut. Di antara permasalahan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tugas yang dibebankan oleh Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) kepada tingkat-tingkat perencanaan di bawahnya adalah untuk mengarahkan perkembangan Ibukota Kecamatan Sidareja yang akan datang ke bagian-bagian kota yang masih relatif terbuka dan cukup aman terhadap kemungkinan terjadi bencana alam banjir. Melalui ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Rencana Umum Tata Ruang

Kota, tugas perencanaan pada tingkat RDTRK adalah antara lain untuk menanggapi permasalahan-permasalahan berikut :

1. Bagaimana merealisasikan struktur ruang dan penggunaan tanah yang efektif dan efisien, yang dapat merangsang perkembangan sesuai dengan yang diinginkan dalam RUTRK.
2. Bagaimana mengupayakan suatu bentuk penyediaan fasilitas dan utilitas umum yang dapat memadai bagi perkembangan kehidupan di wilayah perencanaan.
3. Bagaimana mengatur perkembangan fisik di wilayah Perencanaan sedemikain rupa agar dapat memenuhi standar-standar perencanaan yang berlaku.
4. Bagaimana strategi pelaksanaan pembangunan kota yang harus ditempuh sehubungan dengan aspek pembiayaan pembangunan. Keterbatasan dana yang tersedia dari sumber-sumber dana yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah maupun oleh berbagai sumber masyarakat yang lain akan dapat mempengaruhi bentuk usulan rencana fisik yang dapat dikemukakan. Pada pihak yang lain dapat pula diusulkan suatu bentuk strategi pembangunan atau urutan prioritas kepentingan pembangunan yang dapat merangsang pemanfaatan sumber-sumber dana pembangunan non-pemerintah, terutama menggali potensi masyarakat dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan pembangunan di wilayah Perencanaan. Dalam pelaksanaannya, strategi ini dapat berbentuk proyek-proyek pembangunan pemerintah yang ditempatkan dan ditahapkan secara strategis untuk merangsang masuknya modal-modal swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik di wilayah yang dikembangkan. Bentuk lain yang mungkin dikembangkan yaitu melalui mekanisme perijinan dan pemberian rangsangan pengembangan bagi pihak swasta yang ingin berpartisipasi. Hal ini akan mempengaruhi bentuk pengaturan pembangunan dan memprioritaskan pelaksanaan yang diusulkan.
5. Bagaimana mengatur tata ruang pada tingkat 'mikro', yang mencerminkan suasana sosial masyarakat yang dianggap sebagai identitas Kota Sidareja.

Sementara rumusan mengenai bentuk hubungan sosial masyarakat yang ideal ini memang masih berada pada tahap konsepsi yang abstrak, dalam upaya perencanaan ini diperlukan adanya konsepsi yang lebih konkrit dan dapat diungkapkan dalam bentuk hubungan ruang secara fisik, menuju kepada terciptanya sistem lingkungan sosial yang diinginkan.

Secara fisik ibukota Kecamatan Sidareja yang didominasi oleh daerah padat di bagian tengah kota sedang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, namun, pada saat yang sama kondisi fisik wilayahnya mengalami bencana tahunan yang tidak dapat dihindari yaitu bencana banjir. Seperti diketahui area cakupan bencana banjir tersebut menjangkau di hampir 3 desa pendukung (Sidareja, Sidamulya dan Tinggarjaya), sedangkan desa Kunci merupakan satu-satunya area yang relatif bebas dari bencana tersebut, karena kondisi topografisnya. Untuk diperlukan pengaturan / penataan kembali guna mengantisipasi pertumbuhan Kota Sidareja agar dapat tercipta tata ruang yang efektif. Selanjutnya, Ibukota Kecamatan Sidareja perlu pula menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh seluruh warga kota, baik yang tinggal di tengah/pusat maupun di pinggiran kota. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa permasalahan Ibukota Kecamatan Sidareja adalah menjadikan daerah yang bersifat pedesaan menjadi daerah perkotaan yang lengkap dan cukup aman terhadap bencana terutama banjir tahunan. Hal ini memerlukan investasi yang sangat besar yang didukung dengan peran serta seluruh pihak terkait terutama masyarakat penduduk Kota Sidareja.

5.3. Program Pengembangan Wilayah Kota Sidareja (Desa Kunci)

Kebijaksanaan dasar pengembangan kota dapat diwujudkan dalam dua strata rumusan kerangka pengembangan kota, yaitu kebijaksanaan makro melalui rumusan kegiatan pembangunan sektoral, dan kebijaksanaan mikro melalui rumusan fungsi khusus daerah pengembangan kota. Rumusan kebijaksanaan dasar yang disusun tetap diarahkan dalam kerangka pemecahan alternatif masalah rawan bencana banjir bagi kota Sidareja.

Rumusan Dasar Kebijaksanaan Pengembangan Kota (RDKP) ini dikategorikan dalam 2 rumusan, yaitu :

1. Rumusan atas dasar kajian RUTRK RDTRK IKK Sidareja untuk tahun 1990/1991 sampai 2010/2011 yang menjelaskan kota Sidareja memiliki fungsi-fungsi khusus, yang terkait dengan permasalahan banjir adalah sebagai kota permukiman asal tujuan pelajon, yang dimaksud disini adalah sebagai penyangga urbanisasi kota, dengan penyediaan perumahan pekerja, terminal angkutan pelajon, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sebagai kota pusat kegiatan pertanian berskala regional dengan penyediaan beberapa fasilitas, yaitu pasar induk hasil pertanian, sarana produksi pertanian, koperasi jasa pertanian, dan industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian.
2. Rumusan atas dasar perhitungan deskripsi rawan bencana banjir. Rumusan ini didasarkan atas besaran dan jumlah yang terkena rawan banjir dari lokasi lama ke lokasi baru (desa Kunci). Jeda atau perbedaan yang terjadi menjadikan peluang dan tantangan untuk penentuan kebijaksanaan selanjutnya. Dengan 70 % daerah rawan bencana banjir di kota Sidareja merupakan patokan yang harus diperhatikan didalam penentuan kebijaksanaan pengembangan kota selanjutnya untuk kegiatan pembangunan kota di masa mendatang.

A. Rumusan Dasar Kebijaksanaan Wilayah Pengembangan Kota Skala Regional terhadap Kota Sidareja

Dari dua rumusan yang dijelaskan sebelumnya maka pembahasan dasar skala regional dasar kebijaksanaan kota mengikuti 2 rumusan pokok tersebut.

Sektor Pertanian dan Pengairan

Untuk daerah perkotaan, diperlukan pemanfaatan yang optimal sistem pematusan kota sehingga kerawanan bencana banjir dapat tereliminasi dengan baik. Pengembangan lahan hijau kota atau hutan kota untuk

mengurangi bencana banjir dan meningkatkan daya serap tanah di wilayah rawan bencana, serta meningkatkan kelestarian kota.

Daerah Kunci merupakan wilayah pengembangan kota perlu perhatian terhadap rencana penggunaan areal pertanian menjadi areal terbangun kota. Lahan produktif tetap dipertahankan. Pengendalian lahan pertanian yang memperhatikan fungsi ekologi kota yang berkelanjutan.

Sektor Industri

Pengembangan kegiatan industri yang mengarahkan kepada ekonomi kerakyatan. Industri kecil, industri rumah tangga, industri kerajinan, industri perkebunan, kehutanan (industri rakyat) diarahkan untuk swa-produk melalui kemitraan dengan pihak pemerintah maupun dunia usaha.

Sektor Perhubungan dan Pariwisata

Daerah pengembangan merupakan wilayah belakang kota Sidareja yang termasuk kategori pedesaan. Kebijakan diarahkan pada :

- Pembangunan prasarana, sarana dan fasilitas perhubungan yang menjangkau daerah-daerah terpencil yang potensial,
- Pengembangan obyek-obyek wisata alam yang tidak merusak ekologi dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang menunjang industri agropolitan.

Sebagai upaya untuk menghidupkan kegiatan kota akibat dari pemindahan kegiatan kota ke wilayah ini, diperlukan arahan pada :

- Pusat pelayanan jasa transportasi atau terminal dan peningkatan sistem komunikasi dari lokasi baru terhadap lokasi lama,
- Pembukaan dan peningkatan kualitas sarana perhubungan dalam kerangka meningkatkan aksesibilitas ke kota dari wilayah utara kota.

Sektor Perdagangan

Kebijaksanaan sektor perdagangan lebih diarahkan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi kota wilayah utara. Dengan penekanan pada :

- Pembangunan pusat perbelanjaan atau pasar,
- Simpul-simpul tersier koleksi dan distribusi barang dan jasa wilayah belakangnya,
- Pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima sebagai dampak meluasnya kegiatan ekonomi kota di wilayah pengembangan kota.

Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sektor tenaga kerja dan transmigrasi diarahkan sebagai perwujudan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pengembangan adalah :

- Penyiapan lahan pengembangan untuk kegiatan pemindahan sebagian penduduk yang terkena rawan banjir,
- Pengembangan kegiatan pembangunan melalui program padat karya lebih diprioritaskan sejalan dengan kondisi perekonomian kota,
- Penekanan laju pertumbuhan penduduk kurang dari 1 % per tahun,
- Peningkatan kualitas kehidupan penduduk yang terkena rawan bencana banjir ke lokasi bebas banjir di wilayah pengembangan kota (desa Kunci).

Sektor Pembangunan Daerah, Kota, dan Desa

Sektor ini diarahkan dalam kerangka (1) Pengendalian dan pembinaan pembangunan di sepanjang jalan kolektor primer (perkembangan linear kota), (2) Rencana pemanfaatan ruang pengembangan desa Kunci sebagai wilayah pengembangan kota ke arah utara dan daerah pinggiran, dan (3) Pembentukan satuan wilayah ekonomi di desa Kunci sebagai pusat alternatif kegiatan ekonomi wilayah utara kota Sidareja.

B. Rumusan Dasar Kebijakan Wilayah Pengembangan Kota Skala Lokal Kota Sidareja

Rumusan dasar kebijaksanaan pengembangan kota skala lokal atau mikro membahas arahan pengembangan dan sekaligus pengelolaannya yang harus dijadikan pedoman didalam pelaksanaan selama proses pembangunan kota. Dasar utama sebagai tolak ukur adalah permasalahan kependudukan, terutama penduduk yang terkena rawan bencana banjir yang melanda 70 % dari luas perkotaan. Kependudukan disini lebih ditekankan pada masalah kualitas kehidupan yang akan diwujudkan dimasa mendatang.

Masalah Kependudukan

Masalah kependudukan yang menjadi tolak ukur adalah pemindahan sebagian besar wilayah rawan bencana banjir yang melanda permukiman penduduk untuk diberikan alternatif lokasi yang bebas bencana banjir. Penyiapan lahan untuk relokasi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daya dukung wilayah pengembangan kota (desa Kunci).

Target kepadatan penduduk di wilayah pengembangan kota pun harus mengikuti RUTRK RDTRK IKK tahun 1990/1991 yaitu dengan kepadatan rendah sampai sedang yaitu 40 - 60 jiwa/ha. Dalam proses penyiapan dan kegiatan pembangunan wilayah pengembangan harus mengikut sertakan peran serta masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja model padat karya.

Pengembangan Ekonomi Kota

Pengembangan kegiatan perekonomian wilayah pengembangan kota tidak terlepas dengan kegiatan ekonomi kota Sidareja. Upaya pemindahan secara bertahap fasilitas kegiatan perdagangan adalah upaya menjadikan desa Kunci sebagai pusat pertumbuhan baru wilayah utara kota. Kegiatan sektor riil yang dapat mendukung kegiatan ekonomi kota seperti industri

olahan terus dikembangkan dengan dukungan kemudahan investasi dan birokrasi. Keseimbangan atau pemerataan kesempatan berusaha dengan iklim kondusif harus diciptakan untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi kota.

Pengembangan Perumahan dan Fasilitas Sosial

Pengembangan perumahan dan fasilitas sosial harus mengacu atas peraturan atau norma-norma yang sudah ada, seperti konsep 1 : 3 : 6, kapling siap bangun (KASIBA) maupun lingkungan siap bangun (LISIBA). Kebijakan Nasional dibidang perumahan harus menjadi pedoman didalam pengembangan kota, seperti penyediaan lahan matang, pembangunan rumah murah, kredit pemilikan rumah (KPR).

Pengembangan Sistem Perangkutan (Transportasi)

Wilayah pengembangan kota secara geografis memiliki potensial sebagai titik tumbuh bila didasarkan atas pola perangkutan, yang memudahkan akses wilayah utara mempunyai aksesibilitas ke kota Sidareja. Pemindahan terminal kota merupakan alternatif yang optimal untuk mewujudkan pertumbuhan wilayah utara kota, karena pengembangan ke wilayah selatan terhambat oleh alam. (sungai Cibeurem). Pengembangan teknis sistem perangkutan tetap harus memperhatikan UU nomor 13/1980 dan Peraturan Menteri nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan. Pengembangan didalam rancangan fisik mempertimbangkan aspek-aspek perancangan perpikiran, kegiatan perangkutan, perlengkapan fasilitas.

Pengembangan Utilitas Kota

Dasar pengembangan utilitas kota secara makro mengandung azas pemerataan ke seluruh pelosok kota, penambahan kapasitas suplai maupun produksi, serta peningkatan konsumsi per kapita atas penyediaan utilitas kota sesuai dengan kemampuan kota.

5.4. Tahapan Pelaksanaan Pengembangan Kota Sidareja

Dari beberapa pointer yang harus diperhatikan dalam memberdayakan masyarakat dalam rangka pemindahan lokasi kota Sidareja seperti diuraikan diatas maka akan dilakukan tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut.

TAHAP PERTAMA

Memahami potensi masyarakat adalah langkah pertama sebagai penelitian awal, potensi tersebut terutama persoalan ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan industri dan perdagangan yang dimiliki akankah dapat memberikan manfaat langsung dalam proses pemindahan lokasi IKK (*relocated programme*) ?. Disisi lain potensi ekonomi lain seperti lahan, struktur kependudukan, tingkat ketrampilan masyarakat merupakan potensi yang juga dipertimbangkan sebagai kemampuan ekonomi kota.

Selanjutnya dilakukan kegiatan penyuluhan (*sosialisasi*) berkaitan dengan program pemindahan lokasi IKK kepada masyarakat kota. Manfaat utama dari penyuluhan ini adalah membentuk *visi kesepakatan* antara pemerintah dan masyarakat. Yang membahas program tersebut dari perencanaan, perancangan, sampai ke implementasi dan evaluasi.

TAHAP KEDUA

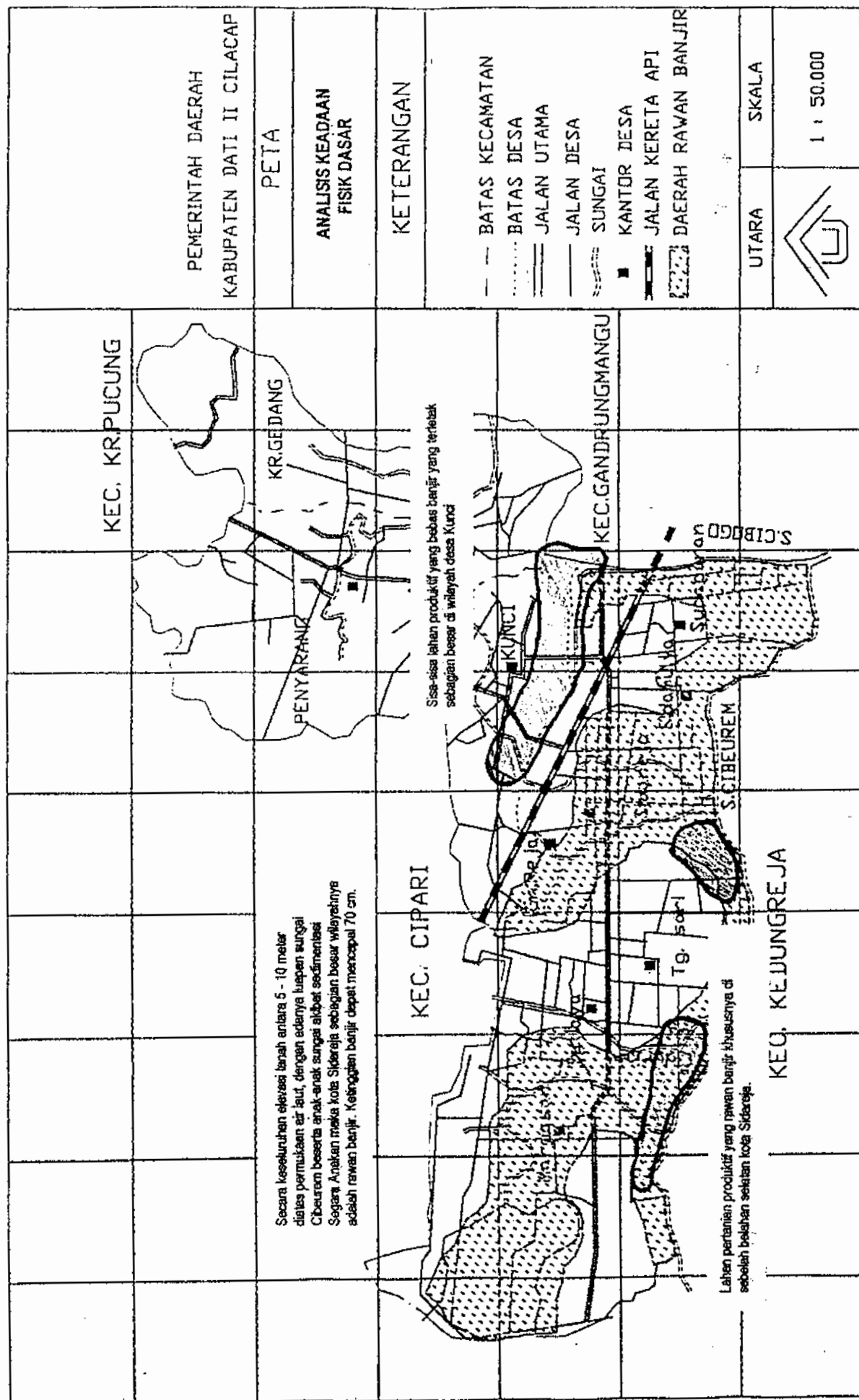
Pembentukan kelembagaan yang menangani kegiatan pemindahan lokasi IKK yang terdiri dari berbagai unsur yang terkait adalah langkah kedua. Lembaga yang bebas dari intervensi pemerintah dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kota. Pola ini dapat dilakukan kesepakatan antara pemerintah dengan pihak masyarakat kota Sidareja dengan didampingi 'pakar'.

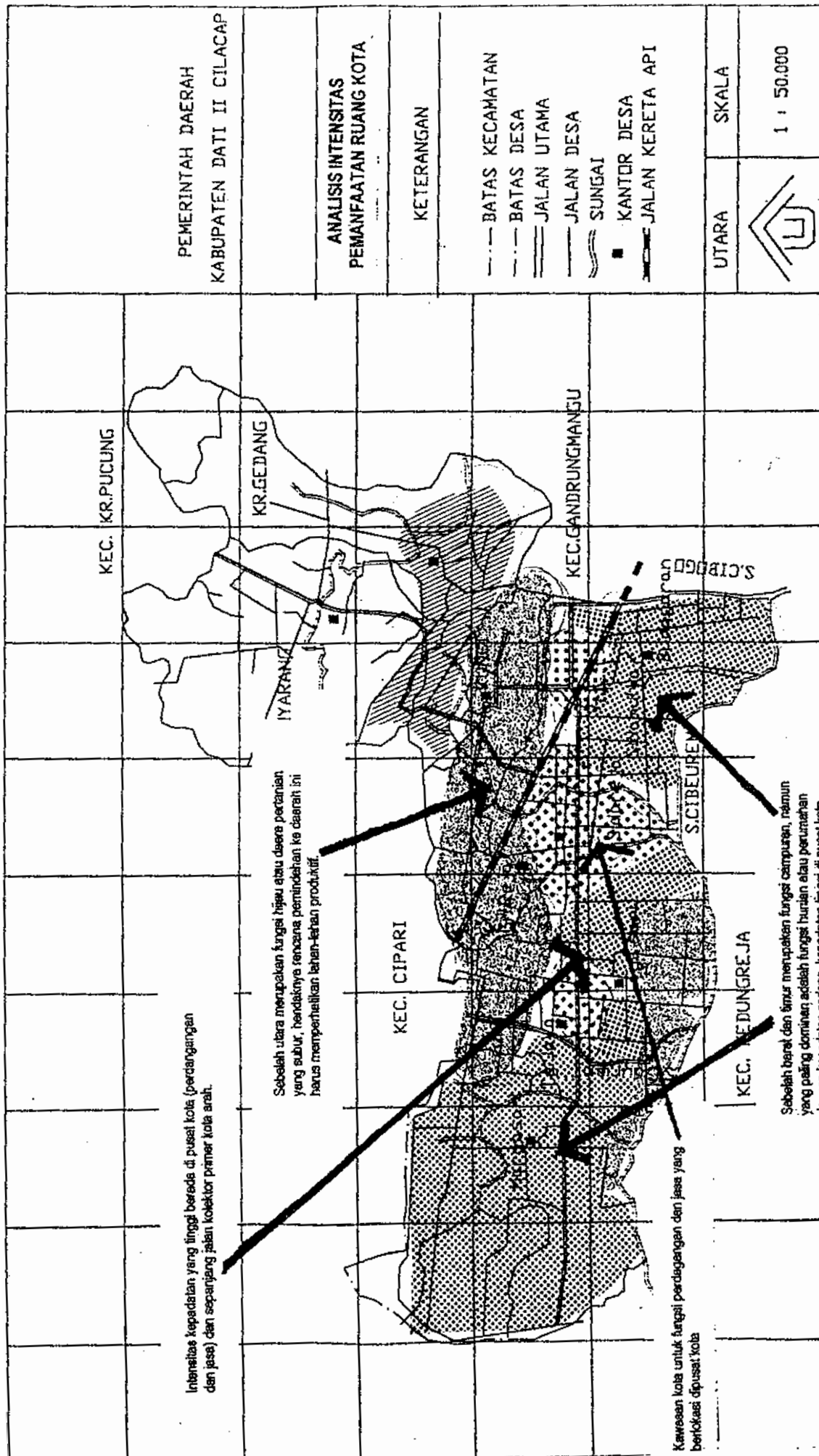
Berbagai pola penanganan dapat dibentuk sesuai dengan akar persoalan yang terjadi di masyarakat.

TAHAP KETIGA

Pelaksanaan pemindahan, pada tahap ini masyarakat kota dilibatkan secara aktif atau bahkan pelaku utama adalah dari masyarakat kota Sidareja yang merupakan subyek dari kegiatan pembangunan. Baik dari proses perencanaan, perancangan, dan implementasi sampai dengan pengendalian kegiatan pemindahan IKK Sidareja.

<p>Pencapaian jangka pendek adalah memindahkan fungsi kegiatan kota yang rawan bencana banjir, terutama fungsi-fungsi vital kegiatan perkotaan seperti fungsi perkantoran, fungsi perdagangan dan jasa.</p>	<p>Fungsi perumahan yang terkena bencana banjir, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus lebih dahulu dipindahkan melalui program pemberdayaan kelompok masyarakat.</p>	<p>Pencapaian selanjutnya adalah program pembangunan kota yang terkait dengan pemecatan masalah rawan bencana banjir, perlu pendakikan partisipasi masyarakat setempat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Sidareja.</p>	<p>Program pembangunan harus melibatkan dunia usaha sebagai mitra kerja Pemerintah dan Masyarakat untuk mewujudkan kota Sidareja yang bebas banjir.</p>	<p>KEC. KR. PUCUNG</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>	<p>KEC. GANDRUMANGU</p>	<p>KEC. GEDANG</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>
<p>Lokasi baru desa Kuri harus dipertimbangkan rencana pemanfaatan ruangnya agar dapat menjadi titik pertumbuhan fungsi utara kota yang berhubungan dengan daerah hinterland.</p>	<p>Lokasi lama yang terkena banjir dapat difungsikan sebagai industri pariwisata air, dengan membentuk empang-empang sporadis yang dikelola oleh kelompok masyarakat sekitarnya.</p>	<p>Lokasi lama yang terkena banjir dapat difungsikan sebagai industri pariwisata air, dengan membentuk empang-empang sporadis yang dikelola oleh kelompok masyarakat sekitarnya.</p>	<p>Lokasi lama yang terkena banjir dapat difungsikan sebagai industri pariwisata air, dengan membentuk empang-empang sporadis yang dikelola oleh kelompok masyarakat sekitarnya.</p>	<p>Lokasi lama yang terkena banjir dapat difungsikan sebagai industri pariwisata air, dengan membentuk empang-empang sporadis yang dikelola oleh kelompok masyarakat sekitarnya.</p>	<p>Lokasi lama yang terkena banjir dapat difungsikan sebagai industri pariwisata air, dengan membentuk empang-empang sporadis yang dikelola oleh kelompok masyarakat sekitarnya.</p>	<p>Lokasi lama yang terkena banjir dapat difungsikan sebagai industri pariwisata air, dengan membentuk empang-empang sporadis yang dikelola oleh kelompok masyarakat sekitarnya.</p>	<p>Lokasi lama yang terkena banjir dapat difungsikan sebagai industri pariwisata air, dengan membentuk empang-empang sporadis yang dikelola oleh kelompok masyarakat sekitarnya.</p>	<p>Lokasi lama yang terkena banjir dapat difungsikan sebagai industri pariwisata air, dengan membentuk empang-empang sporadis yang dikelola oleh kelompok masyarakat sekitarnya.</p>
<p>KEC. KR. PUCUNG</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>	<p>KEC. GANDRUMANGU</p>	<p>KEC. GEDANG</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>	<p>KEC. GANDRUMANGU</p>	<p>KEC. GEDANG</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>
<p>KEC. KR. PUCUNG</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>	<p>KEC. GANDRUMANGU</p>	<p>KEC. GEDANG</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>	<p>KEC. GANDRUMANGU</p>	<p>KEC. GEDANG</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>
<p>KEC. KR. PUCUNG</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>	<p>KEC. GANDRUMANGU</p>	<p>KEC. GEDANG</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>	<p>KEC. GANDRUMANGU</p>	<p>KEC. GEDANG</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>	<p>KEC. KEDUNGREJA</p>





BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kebijakan "*bottom-up*" secara keseluruhan belum dapat diimplementasikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah. Perlu ditingkatkan pemahaman akan peran dan fungsi sebagai "*subyek*" pembangunan atau aktor, bukan lagi sebagai "*obyek*" pembangunan.
- Intervensi dan inisiatif Pemerintah Daerah masih dominan, aspirasi tetap berasal dari atas, bukan dari bawah. Masyarakat hanya terbatas pada akses-akses yang dimiliki dan belum memiliki mobilitas yang tinggi untuk mengusahakan kemajuan bagi masyarakat setempat.
- Diperlukan adanya pendampingan didalam implementasi pelaksanaan nantinya, agar tidak terjadi bias-bias tujuan dan sasaran yang diwujudkan. Pendampingan ini dapat berupa institusi independen yang berasal dari luar batas-batas pelaku pembangunan.

Saran atas hasil penelitian ini adalah :

- Intervensi dari Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan harus dikurangi, sehingga keberadaan masyarakat lebih diutamakan. Agar kegiatan program pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat luas.
- Hasil rencana pemanfaatan ruang kota harus disosialisasikan secara meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat yang terkena bencana banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, Robert. Poverty and Livelihoods: Whose Reality Count ? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds), People From Impoverishment to Empowerment, New York: New York University Press, 1995.
- Kartasasmita, Ginanjar, Ekonomi Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta: CIDES, 1995
- -----, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat, Bandung: Program Pascasarjana Studi Pembangunan ITB, 1996
- -----, Perancangan Sosial dalam Pengembangan Kota, Jurnal Sosiologi, Jakarta: Gramedia Pustakatama, 1994.
- Siregar BE, Model Difusi pada Intervensi Sosial dalam Perubahan Sosial Berencana, Orientasi Sosiologi Terapan, Ikatan Sosiologi Indonesia, Bandung, 1994.
- Tjahjati BS, Beberapa Implikasi Teknis Penerapan UU Penataan Ruang, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kota (PWK) - FTSP ITB, Bandung, 1995.
- Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- -----, "Evaluasi dan Penataan Kembali RUTRK RDTRK IKK Sidareja 1998 -2008", Bappeda Kabupaten Dati II Cilacap, 1998.

CURRICULUM VITAE

Nama	Ir. Budi Sudarwanto, MTi
Tempat dan Tanggal Lahir	Magelang, 4 Agustus 1964
Alamat	Jl. Singosari Timur K. 10, Semarang 50241
Pekerjaan	Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNDIP
Pendidikan	Lulus Sarjana Teknik Arsitektur UNDIP tahun 1990 Lulus Pascasarjana Program Studi Pembangunan ITB Bandung tahun 1997

Pengalaman Penelitian :

1. Studi Wajah Kota Semarang, Sepanjang Jl. Pemuda Semarang (Koordinator)
2. Kajian Kontekstual Terhadap Pembangunan Rumah Susun (Anggota Tim)
3. Arahkan Permukiman Padat Kota (Anggota Tim)
4. Penyusunan RUTRK IKK Juwana Kab. Dati II Boyolali (Koordinator)
5. Penyusunan RUTRK IKK Baturaden Kab. Dati II Banyumas (Koordinator)
6. Penyusunan RTRK BWK III IKK Muntilan Kab. Dati II Magelang (Koordinator)
7. Penyusunan RTRK BWK I Kota Banjarnegara Kab. Dati II Banjarnegara (Koordinator)
8. Studi Kelayakan Perencanaan Rumah Susun di Kelurahan Sekayu (Anggota Tim)
9. Penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah (Anggota Tim)
10. Penyusunan RTBL Kawasan Pantai Panjang dan Nala Propinsi Dati I Bengkulu (Anggota Tim)
11. Penyusunan RTBL Kawasan Danau Dendam Tak Sudah Propinsi Dati I Bengkulu (Anggota Tim)
12. Penyusunan RTBL Kawasan Benteng Marlborough Propinsi Dati I Bengkulu (Anggota Tim)
13. Kajian Masalah Keterjangkauan dan Pengaruhnya Terhadap Kebutuhan Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kawasan Perkotaan; Studi kasus Kota Semarang (Koordinator)
14. Analisis Kebijakan Pengadaan Lahan bagi Pembangunan Perumahan (Anggota Tim)